**PERAN END CHILD PROSTITUTION AND TRAFFICKING (ECPAT)
DALAM MENANGANI ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

Oleh: Annisa Raudhatul Jannah

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research explains the role of the international organization Ending the Sexual Exploitation of Children (ECPAT) in handling cases of online child sexual exploitation in Indonesia. Since the COVID-19 pandemic, children who learn through the internet are increasingly vulnerable to sexual exploitation crimes in the digital world. Therefore, ECPAT Indonesia as part of an international organization is present to assist in handling and preventing these crimes by focusing on handling cases of online child sexual exploitation, taking the role of conducting various programs and collaborating with government and non-government institutions to tackle the problem of online child sexual exploitation.

This research aims to find out how the role played by ECPAT in handling cases of online child sexual exploitation in Indonesia in 2019-2021. This research uses the theory of the role of International Organizations and qualitative research methods with research techniques interviews with international actors who are used as objects of research, and is complemented by literature study, which utilizes secondary data obtained through literature studies obtained from various literature such as books, journals, bulletins, newspapers, annual reports of several related agencies, documents, or other materials that support research. ECPAT in tackling online child sexual exploitation has a strategy in running its program, namely through research, policy advocacy, building networks, and socialization to the community. The roles that ECPAT has played include conducting research or collecting data related to child exploitation, advocating to the government or related parties, training with related institutions with the aim of being better prepared to deal with the problem of child sexual exploitation, and socializing campaigns, workshops, or online educational seminars.

Keywords: Role, ECPAT, Online Child Sexual Exploitation

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan makhluk yang sensitif dan rentan terhadap berbagai kejahatan, sehingga penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan keamanan dan perlindungan terhadap anak-anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berumur di bawah 18 tahun, kecuali apabila ditetapkan lain oleh hukum sebuah negara.¹

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019, menyebabkan seluruh aktivitas yang biasanya dilakukan diluar rumah, seperti bekerja, belajar, dan berlibur terpaksa harus dihentikan dan dilakukan dari rumah (secara daring/*online*). Oleh sebab itu, banyak dari anak-anak yang menggunakan internet untuk belajar. Perkembangan teknologi terkait internet dan komunikasi secara signifikan menjadi peluang bagi pelaku kejahatan seks anak untuk merencanakan tindakan mereka, berkomunikasi secara anonim dengan pelaku kejahatan seks anak lainnya dengan tujuan untuk mengakses, memproduksi dan menyebarkan gambar yang mengandung pelecehan seksual terhadap anak, bahkan mengadakan

pertemuan secara online dengan anak-anak yang dieksploitasi.²

Berdasarkan data *CyberTips* oleh National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) Indonesia pada tahun 2019 memiliki setidaknya 7.2% dugaan kasus eksploitasi seksual anak secara daring dari total jumlah global atau sekitar 727.494 kasus. Sedangkan di tahun 2020, dugaan kasus eksploitasi seksual anak secara daring meningkat menjadi 1.233.972 kasus. Lalu di tahun 2021 menurun menjadi 840.221 kasus.

Melihat tingginya angka dugaan kasus eksploitasi seksual anak secara daring di Indonesia, End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) turut berperan dalam mengatasi masalah eksploitasi seksual anak secara daring. ECPAT merupakan organisasi internasional yang bergerak dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi adanya kejahatan terhadap anak seperti eksploitasi seks anak, pornografi anak, perkawinan anak, dan pariwisata seks anak. ECPAT bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga terkait dalam hal edukasi, kampanye terorganisir dengan harapan agar masyarakat, pemerintah, serta lembaga hukum menyadari bahwa kasus kejahatan eksploitasi seksual anak secara daring sungguh nyata adanya dan berbahaya bagi anak-anak.

Itulah alasan ECPAT mengambil langkah-langkah untuk

¹ UNICEF Indonesia, "Konvensi Hak Anak," UNICEF, April 2019, melalui <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/konvensi-hak-anak> diakses pada 12 Februari 2023.

² Deanna Davy, "Regional Overview: Sexual Exploitation of Children in Southeast Asia," ECPAT International Report, (2017), hal. 4.

membantu pemerintah Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam upaya menghapuskan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual anak secara daring.

Indonesia menjadi salah satu negara ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 26 Agustus 1990 dengan tujuan untuk menjamin dan menghormati hak anak tanpa adanya diskriminasi dalam ranah hukum Negara Indonesia. Indonesia mengadaptasi Konvensi tersebut 12 tahun setelah meratifikasinya, yaitu di dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU No. 35/2014.³ ECPAT sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk mengakhiri segala bentuk eksploitasi seksual anak membantu pemerintah Indonesia dalam menangani eksploitasi seksual anak *online* dan melaksanakan programnya berlandaskan pada Konvensi Hak Anak dan UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak.

KERANGKA TEORI

Teori Organisasi Internasional

Pada dasarnya, konsep organisasi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai harapan dan tujuan yang sama seperti halnya dengan organisasi internasional.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak," KEMENPPPA, 23 November 2020, melalui <https://www.kemenpppa.go.id> diakses pada 12 Februari 2023.

Clive Archer, dalam bukunya yang berjudul *International Organizations* mendefinisikan organisasi internasional sebagai,

“...a formal, continuous structure established by agreement between members, whether governmental representative or not, from at least two sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership.”⁴

Archer mengelompokkan organisasi internasional berdasarkan macam-macam keanggotaan dan spektrum keanggotaannya. Berdasarkan macam-macam keanggotaan (*type of membership*), organisasi internasional dibagi menjadi dua bagian, yakni *International Governmental Organization* (IGO) dan *International Non-Governmental Organization* (INGO). Sedangkan jika ditinjau dari spektrum keanggotaannya (*extent of membership*), organisasi internasional dapat dibagi menjadi organisasi internasional yang mencakup seluruh kawasan atau hanya beberapa kawasan tertentu.

Berdasarkan pengklasifikasian yang diberikan oleh Archer, maka ECPAT termasuk dalam organisasi internasional non-pemerintah (INGO). ECPAT juga mempunyai anggota yang melingkupi setiap kawasan di dunia tanpa adanya batasan pada suatu kawasan tertentu.

⁴ Clive Archer, *International Organization* Third Edition, (London&New York: Routledge, 2001), hal 35.

Archer juga menjelaskan peran organisasi internasional dalam bukunya, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor independen.⁵ Berdasarkan peran yang ditulis oleh Archer, maka ECPAT berperan dalam satu kategori, yaitu sebagai arena. ECPAT sebagai arena atau forum bagi anggota untuk berdiskusi dan bekerjasama mengenai konflik terkait, yang dalam hal ini bekerja sama untuk mencegah dan menangani kasus-kasus eksploitasi seksual anak. ECPAT telah bekerja sama dengan lebih dari 104 negara di seluruh dunia, bekerjasama dengan anggota, pemerintah, mitra, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mencari solusi guna mengakhiri eksploitasi seksual terhadap anak, dalam seluruh manifestasinya.⁶

Dengan demikian, menggunakan teori organisasi internasional, penulis akan menganalisis bagaimana peran dan fungsi yang dilaksanakan oleh ECPAT sebagai salah satu INGO dalam menangani kasus *child sexual exploitation* secara daring pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tingkat Analisa: Kelompok

Dalam sebuah penelitian diperlukan level analisis untuk membantu peneliti mendapatkan tentang variabel mana yang sangat menentukan tindakan aktor. Menurut Mochtar Mas'ood, terdapat lima tingkat level analisis dalam hubungan internasional, yaitu

⁵ *Ibid.*, hal. 68

⁶ ECPAT, "Annual Reports & Finances," 2023, melalui <https://ecpat.org/annual-reports-finances/> diakses pada tanggal 13 Februari 2023.

individu, kelompok-individu, negara-bangsa, kelompok negara-negara dalam suatu regional, dan sistem global.⁷

Penelitian ini menggunakan level analisis kelompok, yang mana penulis akan menilai bagaimana penanganan *child sexual exploitation* berbasis online di Indonesia oleh ECPAT sebagai sebuah organisasi internasional (kelompok).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses pengumpulan data dengan tujuan mendapatkan pemahaman melalui kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.⁸ Peneliti menggunakan kajian dokumen sebagai sarana bantuannya dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan, dan bahan tulisan lainnya. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana upaya ECPAT dalam menangani *online child sexual exploitation* pada masa pandemic COVID-19 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN ECPAT

Sebelum berubah menjadi sebuah jaringan organisasi global yang berpengaruh, ECPAT merupakan sebuah kampanye internasional yang didukung oleh

⁷ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: LP3ES, 1994), hal. 35.

⁸ Sarwono, Jonathan, "*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 193.

gerakan luas dan sepenuhnya didedikasikan untuk satu tujuan yaitu mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dalam pariwisata Asia. Kampanye ini dibentuk oleh sebuah organisasi yang mewakili kelompok-kelompok berbasis agama yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari pariwisata di negara-negara berkembang atau dikenal dengan nama Ecumenical Coalition on Third World Tourism (ECTWT) dengan mengangkat tema “*End Child Prostitution in Asia Tourism*” pada tahun 1990. Kampanye ini dibentuk karena makin maraknya dampak negatif dari pertumbuhan pariwisata, terutama di Thailand, Filipina dan Sri Lanka.⁹

Pada tahun 1996, UNICEF menyelenggarakan Kongres Dunia I dan menjalin kerjasama dengan ECPAT dan NGO *Group for the Convention on the Right of the Child*. Kongres Dunia I diadakan di Stockholm, Swedia dengan tujuan untuk menentang eksploitasi seksual anak.¹⁰ Hasil dari Kongres Dunia I adalah diputuskan bahwa ECPAT bukan lagi hanya sekedar sebuah kampanye namun telah ditetapkan sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang berpusat di Thailand. Penetapan ECPAT sebagai organisasi internasional non-pemerintah pada Kongres Dunia I di Swedia disaksikan oleh 122 perwakilan negara, 105 perwakilan dari PBB organisasi pemerintah, 471 NGO dan 47 perwakilan anak muda.

⁹ ECPAT International, *ECPAT 25 Years: Rallying the World To End Child Sexual Exploitation*, (Bangkok: ECPAT International, 2015), hlm. 17.

¹⁰ ECPAT, “Our History,” 2023, diakses melalui <https://ecpat.org/our-history/> pada tanggal 13 Oktober 2023.

Kongres Dunia I ini juga menghasilkan sebuah komitmen internasional untuk mengatasi isu eksploitasi seksual komersial anak yang dikenal dengan nama Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm.

ECPAT yang telah ditetapkan sebagai sebuah organisasi internasional dengan jaringan global terus menyelenggarakan berbagai pertemuan dan kerjasama untuk meningkatkan dan mengevaluasi hasil kerja dengan membentuk strategi perencanaan baru. ECPAT juga melakukan penelitian guna memberikan wawasan dan informasi mengenai segala bentuk tindakan eksploitasi seksual anak. Saat ini, ECPAT merupakan salah satu jaringan organisasi global terbesar dengan 126 anggota dari 104 negara di seluruh dunia, serta memiliki fokus utama untuk menghentikan aktivitas eksploitasi seksual anak dan dengan tegas menempatkan masalah ini dalam skala global, regional maupun nasional.

Tujuan ECPAT sebagai sebuah organisasi internasional adalah untuk memberikan setiap anak kebebasan dan perlindungan dari segala bentuk ancaman eksploitasi dan pelecehan seksual, termasuk prostitusi, penjualan dan perdagangan anak dengan tujuan seksual, pernikahan dini secara paksa, eksploitasi anak secara daring, dan pariwisata seks anak. ECPAT berusaha untuk memberikan masa depan di mana anak-anak dilindungi dan hak-hak mereka dianggap sebagai prioritas utama.¹¹

¹¹ ECPAT International, “Strategic Framework July 2018-June 2021,” 2021, hlm. 2, diakses melalui <https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/06/ECPAT->

Indonesia sendiri merupakan salah satu anggota dari ECPAT Internasional yaitu ECPAT Indonesia yang berisikan 22 organisasi dan 2 individu di lebih dari 11 provinsi di Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. ECPAT Indonesia pertama kali mulai digagas pada tahun 2000 oleh beberapa profesional dan organisasi yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberantas eksploitasi seksual anak.¹²

Pada tahun 2003, terdapat gagasan untuk menyelenggarakan pertemuan nasional dalam rangka untuk membentuk ECPAT Indonesia. Hal ini dirancang oleh 17 LSM yang bergerak dalam bidang perlindungan terhadap anak. Hingga pada tahun 2004, perwakilan dari salah satu LSM mendaftarkan Indonesia untuk menjadi salah satu bagian dari ECPAT Internasional. Lalu ECPAT Internasional mengeluarkan putusan pada tahun 2005 bahwa ECPAT Indonesia telah menjadi bagian afiliasi, dan akhirnya diakui pada tahun 2011 bahwa ECPAT Indonesia sudah menjadi salah satu anggota ECPAT Internasional.¹³

[STRATEGIC-FRAMEWORK-2018-2021-ENGLISH.pdf](#) pada tanggal 15 Oktober 2023.

¹² ECPAT Indonesia, "Tentang Kami," 2020, diakses melalui <https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/> pada tanggal 18 Oktober 2023.

¹³ Republika, "Ahmad Sofian, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia: Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Meningkat," 28 April 2015, diakses melalui <https://republika.co.id/berita/koran/wawasan/nibk929/ahmadsofiankoordinatorkoordinator-nasional-ecpat-indonesia-eksploitasi->

ECPAT Indonesia juga kerap melakukan observasi terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang ikut membantu mengatasi eksploitasi seksual anak. ECPAT Indonesia dan kelompok lainnya berusaha untuk mendorong pemerintah untuk menguatkan kebijakan untuk menjamin keamanan anak-anak dari kejahatan eksploitasi seksual. Dengan begitu, ECPAT Indonesia menggalang kerjasama dengan badan pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Polri, dan lain-lain.

ECPAT Indonesia juga mengadakan kolaborasi dengan lembaga internasional, diantaranya seperti United Nations, UNICEF, Terredes Hommes (TDH), Sexual Exploitation Children Online (SECO), TikTok, Facebook, Google, Kinder Not Hilfe (KNH), Internet Watch Foundation (IWF), dan lainnya.¹⁴ Salah satu kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama dengan berbagai aplikasi sosial media. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan anak Indonesia di ranah daring.

[seksual-anak-di-indonesia-meningkat](#) pada tanggal 18 Oktober 2023.

¹⁴ ECPAT Indonesia, "Annual Report 2020," hlm. 9, diakses melalui <https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-akhir-tahun-2020-ecpat-indonesia/> pada tanggal 18 Oktober 2023.

Situasi Eksploitasi Seksual Anak *Online* pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia

Selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020, lembaga penegak hukum, layanan bantuan anak, dan mekanisme pelaporan online melaporkan peningkatan kasus berbagai pelecehan dan eksploitasi seksual anak yang terkait dengan daring. Kemungkinan hal ini terjadi karena anak-anak dan pelaku kini lebih sering beraktivitas *online* akibat pemerintah menerapkan *lockdown*. Peningkatan pelaporan dapat juga disebabkan oleh fokus global yang beralih ke kehidupan *online* selama periode *lockdown*, serta tingginya tingkat kewaspadaan yang menghasilkan kekhawatiran yang lebih besar.

Jenis Kejadian	2019	2020	2021
CSAM, termasuk kepemilikan, pemecutan dan distribusi (klasifikasi NCMEC: pornografi anak)	727.437	1.222.934	840.191
Pelaku kejahatan seksual anak yang melakukan peralihan (klasifikasi NCMEC: wanita seks anak)	3	3	1
Pertidapanan seks anak	4	4	7
Pelecehan seksual anak	3	10	2
nama domain memfasilitasi	3		
Kata atau gambar digital menyebarkan di internet	4	4	4
Rajuan daring bagi anak untuk melakukan tindakan seksual	34	14	16
Materi cabul tidak diminta yang dikirim ke anak	1	3	
Total	727.494	1.228.972	840.221

Berdasarkan data yang disajikan oleh NCMEC terkait pengelompokan jenis dugaan kasus eksploitasi seksual anak *online* di Indonesia, Terdapat peningkatan sekitar 16% dalam jumlah laporan terklasifikasi terkait materi pelecehan seksual anak, yang juga dikenal sebagai "pornografi anak," antara tahun 2019 dan 2021. Meskipun jumlah laporan untuk jenis insiden lainnya relatif kecil dan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, adanya beberapa laporan terkait dugaan eksploitasi anak secara luring mungkin menunjukkan bahwa Indonesia dianggap sebagai

destinasi wisata menarik bagi pelaku perjalanan seks.

Hampir seluruh data NCMEC CyberTips yang tercatat untuk Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 diterima dari perusahaan teknologi yang menyediakan layanan elektronik. Ada 58 penyelenggara layanan elektronik yang melaporkan setidaknya satu dugaan eksploitasi anak di Indonesia. Fakta ini mencerminkan perbedaan dari platform yang digunakan oleh masyarakat umum dan pelaku online child sexual exploitation and abuse. Terdapat 21 platform yang mengirimkan jumlah laporan dari tahun 2019 – 2021.

Laporan Penyedia Layanan Elektronik	2019	2020	2021
Facebook	680,889	1,145,328	756,034
Instagram, Inc.	34,863	36,225	37,675
Google	5,482	28,887	22,144
Twitter, Inc./Vine co	2,317	2,237	2,255
WhatsApp Inc.	128	362	1,143
Perforce Inc.	305	437	431
MeetMe.com (aka my Yearbook.com)	217	107	100
imgur, LLC	39	8	91
Dropbox, Inc.	85	75	73
Sendvid	41	117	59
Tagged.com	40	25	48
Discord Inc.			46
Snapchat	3	9	45
Microsoft online operators	66	70	43
Snapchat Kikar		58	39
Tumblr	103	18	39
Yahoo! Inc.	104	48	39
Adobe systems Incorporated	5	0	27
Master Factor	48	16	20
Tinder Inc.			18
www.guest.com/Automatic	2	0	18

Sebanyak 90% dari laporan yang diterima oleh CyberTipline pada tahun 2021 merupakan hasil laporan Facebook, meningkat menjadi 93% untuk keseluruhan periode pelaporan. Kenaikan sekitar 11% dalam jumlah laporan yang terkait dengan Facebook untuk Indonesia antara 2019 dan 2021 menunjukkan kecenderungan serupa dengan data total NCMEC CyberTips di Indonesia. Meskipun dalam proporsi yang lebih kecil, terjadi kenaikan yang mencolok antara tahun 2019 dan 2021 dalam laporan CyberTipline yang berasal dari Google (196%), Instagram (66%), dan WhatsApp (795%).

Sementara itu, laporan dari Twitter mengalami sedikit penurunan.

Berdasarkan temuan ECPAT Indonesia, korban masuk dalam jerat eksploitasi seksual tidak hanya karena bujuk rayu pihak kedua (mucikari, teman, kenalan dan orang tua), namun juga karena kemauan diri sendiri. Artinya ada pengaruh eksternal yang mempengaruhi anak-anak sehingga memutuskan untuk melakukan hal tersebut, misalnya keinginan membantu orang tua, karena kebutuhan barang-barang bermerek, sulitnya mencari kerja sementara anak membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, korban pornografi anak tidak mendapatkan simpati dari orang-orang sekitarnya. Korban mendapatkan pengucilan, *blaming the victim*/menyalahkan perbuatan korban, dan melakukan bullying atau penghakiman. Masyarakat seperti bingung membedakan antara tindakan persetubuhan dengan tindak pornografi anak. Harusnya anak-anak yang videonya disebarakan dikategorikan sebagai korban, karena tanpa persetujuannya video korban disebarakan oleh orang lain.

Upaya ECPAT dalam Menangani Kasus *Online Child Sexual Exploitation* pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia

ECPAT Indonesia aktif terlibat dalam mengatasi isu eksploitasi seksual anak, baik di level nasional maupun regional. Upaya yang dilakukan oleh ECPAT mencakup advokasi kepada instansi pemerintah dan *stakeholders* penting di tingkat nasional dan daerah, fokus pada peningkatan kebijakan, perbaikan regulasi, dan penguatan strategi nasional untuk menghapus

eksploitasi seksual anak. ECPAT juga memberdayakan anggotanya melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop. Selanjutnya, melalui riset, ECPAT mengumpulkan informasi esensial dan menggelar berbagai kegiatan seperti kampanye, edukasi publik, diskusi, dan sebagainya. Program lainnya termasuk inisiasi kelompok remaja untuk mencegah eksploitasi seksual serta layanan dukungan bagi korban, termasuk rehabilitasi, evakuasi, reintegrasi, dan pemberdayaan.

ECPAT Indonesia dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak *online*, melakukan empat strategi yaitu, riset atau penelitian, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi.

1. Riset / Penelitian

Selama periode 2019-2021, ECPAT telah melaksanakan sejumlah penelitian yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. *Pertama*, terdapat riset *Disrupting Harm* yang di inisiasi oleh ECPAT, *Global Partnership to End Violence against Children*, dan *Safe Online* yang memilih untuk mengalokasikan sumber daya untuk penelitian guna memperkuat basis bukti terkait eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring. Fokus penelitian ini secara khusus difokuskan pada 13 negara di wilayah Afrika Timur dan Selatan serta Asia Tenggara. Beberapa negara yang menjadi fokus di wilayah Afrika Timur dan Selatan mencakup Etiopia, Kenya, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan, Tanzania, dan Uganda, sementara di Asia Tenggara termasuk Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Proyek *Disrupting Harm* melibatkan kerja sama antara ECPAT, INTERPOL, dan Kantor Penelitian UNICEF dalam perancangan dan pelaksanaan proyek ini. Ketiga organisasi tersebut mengumpulkan data untuk enam kegiatan penelitian yang berbeda. Pengumpulan data dilakukan secara luas di Indonesia sejak awal 2020 hingga awal 2021, dengan proses yang berlangsung selama pandemi COVID-19 dan penerapan karantina wilayah oleh Indonesia sebagai upaya menekan penyebaran pandemi tersebut. Tim penelitian melakukan analisis data dan menyusun laporan untuk 13 negara, termasuk Indonesia, dengan analisis untuk Indonesia selesai pada Januari 2022.

Tujuan dari laporan ini adalah memberikan landasan dan bukti bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengatasi dan mencegah eksploitasi seksual anak secara daring serta memperkuat dukungan bagi anak-anak. Temuan dan tindakan yang direkomendasikan diharapkan memiliki relevansi global yang lebih luas. Rekomendasi tindakan yang diajukan dalam laporan ini sejalan dengan *WeProtect Model National Response* dan berkontribusi pada Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Kedua, ECPAT melakukan asesmen situasi eksploitasi seksual anak di ranah daring yang didanai oleh *Global Giving* bekerjasama dengan Meta. Melalui dukungan dana ini ECPAT melakukan asesmen situasi anak korban eksploitasi seksual di ranah daring. Program asesmen dilakukan ECPAT Indonesia bekerjasama dengan Bandungwangi dari bulan Oktober 2022 hingga

Januari 2023. Adapun hasil dari temuan program ini yaitu ditemukannya 18 platform media sosial, platform pertemanan dan kencan yang digunakan sebagai sarana untuk mengeksploitasi seksual anak dalam pelacuran online, serta adanya fenomena penawaran live streaming dan penjualan materi eksploitasi seksual/kekerasan seksual anak.¹⁵

Ketiga, di tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menginisiasi penyusunan Buku Pedoman Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. Persiapan ini merupakan tindak lanjut dari advokasi ECPAT Indonesia kepada KPPPA mengenai pentingnya Pemerintah Indonesia terhadap buku tersebut. Dari hasil advokasi tersebut, dibentuklah tim penyusun buku panduan ini yang terdiri dari perwakilan ECPAT Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan JARAK. Setelah melalui serangkaian pertemuan dan FGD, buku ini telah disusun oleh tim penyusun pada akhir tahun 2019.

Buku ini berisi informasi dan pengetahuan mengenai definisi atau terminologi eksploitasi seksual anak, termasuk eksploitasi seksual anak online. Dalam buku ini, eksploitasi seksual anak online dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu sexting, grooming (bujuk rayu untuk tujuan seksual),

¹⁵ ECPAT Indonesia, (2022), Annual Report 2022, hlm. 19 diakses melalui <https://ecpatindonesia.org/sumber/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2022/> pada tanggal 13 Februari 2023.

dan kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung.¹⁶

2. Advokasi

ECPAT Indonesia dalam melaksanakan tujuannya untuk menghapuskan eksploitasi seksual terhadap anak banyak melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah dan bekerjasama dengan pemerintah sendiri untuk melakukan berbagai program dalam hal pencegahan maupun penanggulangan eksploitasi seksual anak.

Pertama, di tahun 2020, ECPAT Indonesia dan Kinder Not Hilfe (KNH) berkolaborasi dalam sebuah program advokasi untuk meningkatkan kemampuan organisasi layanan bantuan bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual online di lima kota di Jawa. Program tersebut memperkuat tiga sektor yang mendukung peningkatan kapasitas layanan bagi korban eksploitasi seksual anak. Sektor pertama yang ditekankan adalah pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan memperkuat dan menjamin kelangsungan program peningkatan kapasitas layanan bagi korban eksploitasi seksual online anak di lima kota tersebut dan kota-kota lain yang belum tercakup oleh program ini.¹⁷

Kedua, di tahun 2019, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan KPPPA dalam penyusunan Pedoman

Standar Penyediaan Layanan (SPL) bagi Anak yang Terkena Dampak Pornografi, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan untuk Anak yang Terkena Dampak Pornografi. Program ini bertujuan untuk menciptakan standar nasional bagi unit pelaksana, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam memberikan layanan kepada korban dan pelaku pornografi.

Standar pelayanan ini dimaksudkan untuk menjadi landasan yang digunakan dalam memberikan penanganan awal, pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.¹⁸

Ketiga, mulai tahun 2018 hingga 2020, KPPPA telah berkolaborasi dengan ECPAT Indonesia dalam menginisiasi sebuah program yang bertujuan penting. Program ini mengusung ide pembentukan panduan untuk menciptakan Desa/Kelurahan yang bebas dari pornografi. Program ini fokus pada perlindungan anak-anak dari berbagai situasi yang terkait dengan konten pornografi, mengakui bahwa paparan semacam itu dapat merusak perkembangan mereka.¹⁹

¹⁶ Deden Ramadani; Maria Clara Bastiani; Ahmad Ghozi, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), hlm. 65.

¹⁷ ECPAT Indonesia, (2020), *op. cit.*, hlm. 21.

¹⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Bagi Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.

¹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembentukan Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi," (2023), hlm. 14.

Program ini juga mengarah pada peningkatan partisipasi aktif dari perangkat pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan dalam menerapkan kebijakan perlindungan anak dari dampak negatif pornografi. Selain itu, program ini juga mengupayakan pendidikan kepada masyarakat secara menyeluruh tentang bahaya yang terkandung dalam konten pornografi, khususnya terhadap anak-anak, sehingga mereka dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi generasi mendatang.

3. Pelatihan

Pelatihan dalam upaya pencegahan eksploitasi seksual anak sangatlah vital untuk mempersiapkan individu yang lebih terampil dalam membantu korban dan agar memiliki pengetahuan yang memadai dalam menangani pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak secara daring.

Pertama, Proyek AMAN (Aku Muda Aku Nyaman) adalah hasil kerjasama antara ECPAT Indonesia dan Facebook Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan generasi muda terkait lingkungan digital serta melindungi mereka dari eksploitasi seksual online.²⁰

Meskipun situasi pandemi, pendidikan mengenai literasi digital dan keamanan anak tetap harus dilakukan. Oleh karena itu, Facebook dan ECPAT Indonesia mengembangkan program pelatihan online yang diikuti oleh 240 peserta di enam kota, termasuk Medan, Jakarta, Solo, Mataram, Kupang, dan Ambon. Program ini tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi

juga kepada komunitas mereka. Pelatihan ini terdiri dari empat sesi dengan pembicara dari ECPAT Indonesia dan Facebook Indonesia. Peserta tidak hanya bertindak sebagai pendengar, tetapi juga diharapkan untuk menyebarkan pengetahuan yang mereka peroleh kepada teman-teman sebaya dan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kompetisi konten digital yang menjadi bagian dari program. Program ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan anak dalam penggunaan teknologi digital.

Hingga tahun 2022, ECPAT Indonesia mencatat kesuksesan AMAN Project dan AMAN Warrior dalam meningkatkan pemahaman ribuan anak-anak dan pemuda di Indonesia. Program ini mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Deputy Bidang Perlindungan Anak dan Meta sebagai perusahaan platform digital yang turut serta dalam pelaksanaannya. Keduanya sepakat bahwa program ini berhasil dan layak diadopsi oleh negara-negara lain dalam upaya meningkatkan literasi digital anak-anak.

Kedua, pada pertengahan tahun 2020, ECPAT Indonesia dan *Down to Zero Alliance* memulai program *Voice for Change* yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Program ini berjalan selama satu tahun hingga Juni 2021 dan melibatkan 23 kelompok anak dan 2 kelompok remaja dari delapan kota di Indonesia, termasuk Batam, Medan, Jakarta, Indramayu, Solo, Surabaya, Denpasar, dan Lombok. Anak-anak akan diberi pelatihan

²⁰ ECPAT Indonesia, (2020), *op.cit*, hlm. 33.

untuk melakukan advokasi di tingkat lokal dan nasional. Aliansi bersama mitra di daerah akan memberikan platform untuk memperluas pengaruh suara anak-anak dan generasi muda (*Voice for Change*) sehingga dapat mencapai pemangku kepentingan dan meningkatkan sistem perlindungan anak terkait eksploitasi seksual anak.²¹

Program ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak yang telah menjadi korban atau yang berisiko mengalami eksploitasi seksual anak, agar mereka dapat mengungkapkan pandangan mereka, berbagi pengalaman, dan menyampaikan harapan mereka. Hal ini diharapkan akan mendorong pengambil keputusan untuk serius memperhatikan kepentingan anak-anak dalam pembuatan kebijakan yang terbaik.

4. Sosialisasi

Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah eksploitasi seksual anak. Tahap awalnya adalah menyediakan pendidikan dan pengetahuan dasar mengenai risiko yang terkait dengan eksploitasi seksual anak. Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, kampanye, diskusi, *workshop*, dan metode lainnya.

Pertama, program *Safer Internet Day* "Anak Aman dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual di Dunia Online" merupakan hasil kolaborasi antara ECPAT Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gerakan Nasional

Literasi Digital Siberkreasi, dan Meta. Program ini dilaksanakan di tahun 2021 dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran anak dan orang muda tentang pentingnya membangun kebiasaan online yang aman agar mereka terhindar dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak dalam dunia online. Rangkaian perayaan *Safer Internet Day* dimulai dengan diadakannya lomba kontes suara anak, penampil perayaan, kelas mendalam tentang eksploitasi seksual anak online secara daring, *workshop*, *live talkshow*, hingga acara puncak yang dilakukan secara luring yang dihadiri MenPPPA, Menko PMK, dan Menkominfo.²²

Kedua, ECPAT Indonesia bersama KOMPAK Jakarta, melalui Program Jawara Internet Sehat, menjalin kerjasama dengan ICT Watch dan Siberkreasi untuk melaksanakan Program HERO (Hindari Hoax dan ESA di Ranah Online) dan BESTIE (Bersama Stop Konten Negatif Melalui Edukasi). Program ini dilaksanakan dari bulan Agustus hingga Desember 2021.

KOMPAK Jakarta mengadakan roadshow sosialisasi tentang bahaya eksploitasi seksual anak online, literasi dan keamanan digital, serta penyebaran hoax di berbagai sekolah, termasuk SMKN 6 DKI Jakarta, SMP Suluh Jakarta, SMPN 86 Jakarta, Sekolah Bhakti Prima, SMPN 154 Jakarta, Mumtaza Islamic School, Pramuka Dewan Kerja Ranting Pancoran, Dinas PPAPP DKI Jakarta, dan Forum Anak DKI Jakarta. Total peserta yang menjadi

²¹ *Ibid*, hal. 27.

²² ECPAT Indonesia, (2022), *op.cit*, hlm. 13.

sasaran sosialisasi mencapai 2000 anak.²³

Selain melaksanakan sosialisasi secara langsung, ECPAT Indonesia juga melakukan sosialisasi secara daring dengan lebih dari 1000 peserta. Dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai internet aman untuk anak, ECPAT Indonesia bekerja sama dengan KPPPA mengadakan sosialisasi online dengan tema “Internet Aman Untuk Anak.”

Ketiga, ECPAT Indonesia aktif dalam kegiatan peningkatan kesadaran untuk mempromosikan inisiatif penghapusan eksploitasi seksual anak lewat kolaborasi kampanye dengan pihak lain. Pada tanggal 8 Mei 2020, melalui program E-Chat, ECPAT Indonesia mengadakan dialog dengan tokoh masyarakat Cornelia Agatha. Diskusi tersebut membahas peluang dan tantangan terkait ‘*Safe Children Online*’ bagi anak dalam berinternet, serta pentingnya peran orang tua sebagai sahabat anak dalam memahami dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia secara *online*.

Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2020, ECPAT Indonesia bersama LINE Indonesia mengadakan kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran mengenai ‘Materi Kekerasan Seksual Anak’. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang isu sensitif ini dan mendorong tindakan

preventif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual *online*.

ECPAT Indonesia bersama Internet Watch Foundation (IWF) telah secara resmi meluncurkan Portal Pelaporan Online Materi Kekerasan Seksual Anak sejak tanggal 19 Juni 2020. Dengan adanya portal ini, diharapkan dapat mengurangi penyebaran konten kekerasan seksual terhadap anak secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah reviktimisasi anak-anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual dengan mengidentifikasi, memblokir, dan menghapus konten-konten tersebut dari internet.

Tidak hanya itu, melalui kolaborasi dengan organisasi nirlaba ECPAT Indonesia dan Yayasan Sejiwa (SEJIWA), TikTok, sebagai platform distribusi video singkat terdepan, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan digital remaja. Kolaborasi ini merupakan bagian dari kampanye global TikTok yang dikenal sebagai *Giving Season* (#GivingSzn), di mana para kreator, organisasi nirlaba, dan komunitas berpartisipasi dalam menyebarkan pesan positif melalui platform TikTok.²⁴

ECPAT Indonesia, SEJIWA, dan NXG juga berkolaborasi dengan Meta untuk mendukung kampanye

²³ *Ibid*, hal. 16.

²⁴ TikTok Newsroom, “TikTok Gandeng Organisasi Nirlaba ECPAT dan Yayasan Sejiwa untuk Suarakan Keamanan Digital Remaja di Platform,” TikTok Indonesia, 3 Desember 2021, diakses melalui <https://newsroom.tiktok.com/in-id/tiktok-gandeng-organisasi-nirlaba-ecpat-dan-yayasan-sejiwa-untuk-suarakan-keamanan-digital-remaja-di-platform> pada tanggal 7 Februari 2024, pukul 20.15 WIB.

yang diselenggarakan Meta yaitu ‘*Help Protect Children Don’t Share, Don’t Comment & Report.*’ Tujuan kampanye ini adalah untuk melindungi anak-anak sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia mengenai risiko yang muncul ketika seseorang membagikan gambar atau video pelecehan seksual terhadap anak yang beredar di media sosial.²⁵

SIMPULAN

Eksplorasi seksual anak secara online merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet untuk memfasilitasi eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Eksploitasi seksual anak online terbagi menjadi lima bentuk, yaitu materi kekerasan/pelecehan seksual anak (pornografi anak), bujuk rayu, *sexting*, *sextortion*, dan *live streaming*. Eksploitasi seksual anak sendiri terdiri dari tindakan-tindakan kriminal yang mengancam dan merendahkan integritas psikis dan fisik anak.

Untuk mengatasi eksploitasi seksual anak, diperlukan keteraturan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, pemerintah, dan organisasi baik di tingkat nasional maupun

internasional. Upaya internasional dalam menanggapi masalah eksploitasi seksual komersial anak telah mengalami kemajuan, seperti melalui Kongres Dunia Pertama di Stockholm pada 1996 dan Kongres Dunia Kedua di Yokohama pada 2001. Hasil dari kegiatan tersebut termasuk dokumen deklarasi Stockholm dan Yokohama, serta ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi ILO 182 melalui UU No. 1 Tahun 2001.

Akibat pandemi COVID-19, anak-anak kini belajar dan bermain melalui internet, meningkatkan risiko eksploitasi seksual anak secara daring. Selain instrumen hukum internasional, peran internasional, seperti organisasi ECPAT, menjadi penting. Di Indonesia, ECPAT berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan badan internasional. Program-programnya termasuk riset, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi daring. Sosialisasi ini sangat berpengaruh karena langsung mengedukasi berbagai pihak, dari keluarga hingga penegak hukum dan pemerintah, dalam pencegahan eksploitasi seksual anak *online*.

Sesuai dengan teori organisasi internasional yang disampaikan oleh Clive Archer, bahwa organisasi internasional memiliki peran sebagai arena. Disini ECPAT merupakan organisasi internasional yang menjadi tempat bagi para anggotanya untuk membahas dan menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik. Dalam hal ini, ECPAT Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 telah banyak melaksanakan program-program untuk mencegah dan menangani

²⁵ Fimela Reporter, “Kolaborasi Meta dengan LSM dan Kreator, Lindungi Anak dari Konten Pelecehan di Indonesia,” *Fimela.com*, 15 Februari 2023, diakses melalui <https://www.fimela.com/amp/5203547/kolaborasi-meta-dengan-lsm-dan-kreator-lindungi-anak-dari-konten-pelecehan-di-indonesia> pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 21.05 WIB.

kasus eksploitasi seksual anak *online* dengan melakukan kerjasama dan kolaborasi sebagai bentuk peran arena bagi organisasi internasional, baik itu kerjasama dan kolaborasi dengan pihak pemerintah, organisasi lokal, dan organisasi internasional lainnya.

ECPAT Indonesia bekerjasama dengan INTERPOL dan UNICEF untuk melakukan penelitian *Disrupting Harm* yang juga dilaksanakan di 13 negara lainnya. ECPAT Indonesia juga bekerjasama dengan KPPPA dalam membentuk asesmen situasi eksploitasi seksual anak *online* pada masa pandemi COVID-19, serta bekerjasama dalam penyusunan Buku Pedoman Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. Dalam bidang advokasi, ECPAT Indonesia berhasil bekerjasama dengan Kinder Not Hilfe (KNH) dan KPPPA untuk melakukan advokasi kebijakan terkait eksploitasi seksual anak *online*. ECPAT Indonesia juga bergabung dengan aliansi *Down to Zero*. ECPAT Indonesia juga secara aktif memberikan edukasi terkait bahaya internet dan eksploitasi seksual anak *online* melalui sosialisasi dan pelatihan baik di media sosial maupun secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, C. (2001). *International Organization (Third Edition)*. London: Routledge.
- Davy, D. (2017). *Regional Overview: Sexual Exploitation of Children in Southeast Asia*. ECPAT International.
- ECPAT. (2023). *Annual Report & Finances*.
<https://ecpat.org/annual-reports-finances/>
- ECPAT. (2023). *Our History*.
<https://ecpat.org/our-history/>
- ECPAT Indonesia. *Annual Report 2020*. 2020.
<https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-akhir-tahun-2020-ecpat-indonesia/>
- ECPAT Indonesia *Annual Report 2022*. 2023.
<https://ecpatindonesia.org/sumber/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2022/>
- ECPAT Indonesia. *Tentang Kami*. 2020. <https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/>
- ECPAT International. (2015). *ECPAT 25 Years: Rallying the World To End Child Sexual Exploitation*. Bangkok: ECPAT International.
- ECPAT International. (2021). *Strategic Framework July 2018-June 2021*.
<https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/06/ECPAT-STRATEGIC-FRAMEWORK-2018-2021-ENGLISH.pdf>
- KemenPPPA. *Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembentukan Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi*. 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020, November 23).

Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak.

<https://www.kemenpppa.go.id>

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Bagi Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.

Mas'ood, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES.

Newsroom, TikTok. *TikTok Gandeng Organisasi Nirlaba ECPAT dan Yayasan Sejiwa untuk Suarakan Keamanan Digital Remaja di Platform*. December 3, 2021. <https://newsroom.tiktok.com/id/tiktok-gandeng-organisasi-nirlaba-ecpat-dan-yayasan-sejiwa-untuk-suarakan-keamanan-digital-remaja-di-platform>

Ramadani, Deden; Maria Clara Bastiani; Ahmad Ghozi. (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*.

Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Reporter, Fimela. *Kolaborasi Meta dengan LSM dan Kreator, Lindungi Anak dari Konten Pelecehan di Indonesia*. February 15, 2023. <https://www.fimela.com/amp/5203547/kolaborasi-meta-dengan-lsm-dan-kreator-lindungi-anak-dari-konten-pelecehan-di-indonesia>

Republika. *Ahmad Sofian, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia: Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Meningkat*. April, 2015. <https://republika.co.id/berita/koran/wawasan/nnibk929/ahmadsofiankoordinator-nasional-ecpat-indonesia-eksploitasi-seksual-anak-di-indonesia-meningkat>

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

UNICEF Indonesia. (2019, April). *Konvensi Hak Anak*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/konvensi-hak-anak>